PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN	**NOMOR SOP**	SOP/009/BPKAD/2026
	TANGGAL PEMBUATAN	9 November 2026
	TANGGAL REVISI	9 November 2026
	TANGGAL EFEKTIF	9 November 2026
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si NIP. 196812091988031004
	NAMA SOP	**PEMBERIAN DAN PENYIMPANAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID 2. Memiliki kemampuan pelayanan publik 3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik 4. Menguasai teknologi informasi
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	1. Lembar Kerja 2. Komputer
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP tidak dijalankan dengan baik, surat masuk akan terkendala untuk didisposisi pimpinan	Disimpan sebagai Arsip

No	Kegiatan			Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan setelah melalui tahap pengujian konsekuensi			Berita acara Pengujian Konsekuensi	Setelah tahap Pengujian Konsekuensi	Daftar Informasi yang Dikecualikan	
2	Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian melalui tahap pengujian konsekuensi Informasi dikecualikan yang dinyatakan terbuka wajib disediakan dan dapat diakses oleh setiap orang			(1) Daftar Informasi yang Dikecualikan (2) Dasar hukum pengecualian (3) Matriks uji konsekuensi	Tentatif	Daftar informasi yang akan berakhir jangka waktu pengecualiannya	
3	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan mengarsipkan dokumen			SK PPID tentang klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Dokumentasi informasi yang Dikecualikan	
4	Menggungah Surat Keputusan PPID tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan ke website resmi PPID maupun melalui sarana informasi lainnya			Dokumentasi informasi yang Dikecualikan	Tentatif	(1) Dokumentasi informasi yang Dikecualikan yang di upload ke website ppid.samarindakota.go.id (2) Arsip	